

EVALUASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BMKG PROPINSI DKI

Oleh: Chepi Safei Jumhana

ABSTRAK

Tingkat efiseinsi pagu anggaran satuan kerja wilayah Propinsi DKI masing- masing merupakan pembahasan penelitian pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa data hasil evaluasi laporan rekapitulasi dan realisasi sesudah revisi tahun anggaran 2006 s.d 2010.

Variabel independen adalah Satuan kerja Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Stasiun Geofisika sedangkan variabel difendennya adalah jumlah seluruh sampel data hasil laporan rekapitulasi dan realisasi anggaran tahun 2006 s.d 2010 hasil final Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara.

Pendekatan metode ANOVA (*analisis of Varians*) dan standar kritis frekuensi $F_{\alpha} = 0.05$, diasumsikan perbedaan tingkat efisiensi dan hasil aturan keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efesiensi pada masing-masing satuan kerja tidak mengalami perbedaan yang signifikan dalam mengatur dan mengelola pagu angggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa, mekanisme kinerja keuangan yang berlaku berdasarkan pada Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008.

Kata Kunci : Evaluasi Anggaran, Peningkatan Efisiensi, Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah sistem penganggaran menjadi topik hangat di era awal tahun 2000-an, ketika pemerintah menerbitkan beberapa peraturan, khususnya Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 9 menerangkan tugas menteri keuangan atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan anggaran kementrian/lembaga yang dipimpinnya.
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Melaksanakan anggaran kementrian/lembaga
4. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya.

Beberapa peraturan pemerintah sebagai dasar petunjuk pelaksanaannya, mengharuskan sistem penganggaran yang berbeda dengan sebelumnya seperti perubahan dari sistem *dual budgeting* menjadi *unified budgeting*, penganggaran dengan basis input menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting system*), dan penganggaran dengan kerangka pengeluaran berjangka menengah. Sistem ini menggantikan sistem penganggaran tradisional (*traditional budgeting system*) yang disinyalir sarat dengan kelemahan, seperti adanya tumpang tindih antara biaya dan kegiatan yang berdampak pada inefisiensi anggaran, artinya biaya pengeluaran dalam kegiatan pengelolaan keuangan tidak disesuaikan dengan keadaan keuangan melalui proses pengesahan anggaran lebih dulu. Bentuk sistem penganggaran tradisional adalah wujud sistem penganggaran keuangan APBN yang ditetapkan pemerintah setiap tahun. Sedangkan sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan wujud kerangka penganggaran jangka menengah dan terpadu setelah dibahas terlebih dahulu di DPR.

Perubahan sistem penganggaran yang baru tersebut sudah barang tentu

membawa konsekuensi dan perlunya dilakukan beberapa perubahan dalam penyusunan dan prosedur penetapan dokumentasi anggaran, seperti perubahan dari DIP/DIK menjadi DIPA. Perubahan sistem penganggaran dan dokumen-dokumen anggaran pendukungnya tidak akan dapat berhasil diwujudkan apabila tidak terjadi perubahan *mindset* dari para pembuat kebijakan, pelaku dan pengguna dokumen anggaran itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Perencanaan dan Penganggaran yang bersumber APBN dana dalam DIPA dan implementasi dalam POK (Petunjuk Operasioanal Kegiatan) sebagai realisasi yang bertujuan memudahkan satuan kerja (satker) dalam penyusunan mempertajam perencanaan pembangunan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. dengan berbagai kegiatan dan catatan prestasi yang telah kita raih dan wujudkan, di samping juga catatan tentang kekurangan yang perlu dibenahi dan diperbaiki. khususnya di lingkungan Propinsi DKI Jakarta.

Penganggaran Perencanaan terhadap kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa UPT. telah menyelesaikan pembuatan Rencana Induk BMKG 2010 – 2030 yang sangat penting bagi langkah dan arah pembangunan BMKG. Rencana induk ini hanya memuat gagasan-gagasan besar,

kerangka pokok dan pilar-pilar utama pembangunan BMKG jangka panjang. Dari laporan yang ada dapat diketahui bahwa laporan kajiannya sedang diedit untuk menjadi lampiran Keputusan KBMKG tentang Rencana Induk BMKG 2010 – 2030.

Implementasi Rencana Induk adalah untuk jangka menengah (5 tahunan) dan disesuaikan dengan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional** (RPJMN). Oleh karenanya, terhadap Rencana Induk tersebut perlu dilakukan *review* setiap 5 (lima) tahun sekali. pada umumnya dan satuan kerja.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan anggaran diperoleh Satker Tanjung Priok terhadap hasil laporan rekapitulasi dan realisasi anggaran akhir tahun belanja kegiatan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa untuk wilayah Propinsi DKI
2. Sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan anggaran Satker Stasiun Meteorologi Kemayoran terhadap hasil laporan rekapitulasi dan realisasi anggaran akhir tahun belanja kegiatan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa untuk wilayah Propinsi DKI

3. Sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan anggaran Satker Stasiun Geofisika Jakarta terhadap hasil laporan rekapitulasi dan realisasi anggaran belanja akhir tahun kegiatan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa untuk wilayah Propinsi DKI
4. Sejauh mana tingkat efisiensi hasil penelitian pengelolaan anggaran terhadap kegiatan yang mendukung kelancaran operasional.
5. Sejauh pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran apabila ditemukan ketidak sesuaian dengan yang tersedia dalam DIPA.
6. Sejauh mana Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Pengadaan Barang dan jasa dapat meningkatkan efisiensi produktivitas kerja di satker wilayah Propinsi DKI.

C. PEMBATASAN MASALAH

Permasalahan prioritas aktual yang akan dibahas penulis adalah “ Sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan pagu anggaran di masing-masing Satker untuk wilayah koordinator Propinsi DKI terhadap hasil laporan rekapitulasi dan realisasi anggaran akhir tahun belanja kegiatan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa.”

Dari hasil perhitungan penelitian maka perbandingan tingkat efisiensi terhadap laporan rekapitulasi dan realisasi belanja satuan kerja pada semester II selama 5 tahun diperoleh gambaran realisasi yang diperoleh menunjukkan pengeloalan anggaran wilayah propinsi DKI.dilaksanakan sesuai standar prosudur yang sudah berjalan di masing-masing satker.

D. PERUMUSAN MASALAH

Dari penelitian ini akan diformulasikan beberapa masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi anggaran satker koordinator dengan satker wilayah masing-masing jika dibandingkan dengan hasil laporan rekapitulasi dan realisasi belanja satuan kerja tahun 2006 s.d 2010 kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI. terhadap hasil penelitian
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi pagu anggaran antara Satker Priok dengan Satker Stasmet Kemayoran jika dibandingkan dengan hasil laporan rekapitulasi dan realisasi tahun 2006 s.d 2010 kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI. terhadap hasil penelitian
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi pagu anggaran Satker Priok dengan Satker Stas.Geofisika Jakarta jika dibandingkan dengan hasil evaluasi laporan realisasi tahun 2006 s.d 2010 kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI. terhadap hasil penelitian
4. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi pagu anggaran antara Satker Geofisika dengan Satker Stasmet Kemayoran jika dibandingkan dengan hasil evaluasi laporan rekapitulasi dan realisasi tahun 2006 s.d 2010 kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI. terhadap hasil penelitian

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi anggaran satker koordinator dengan satker wilayah masing-masing dibandingkan hasil laporan rekapitulasi dan realisasi dengan evaluasi hasil penelitian kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI.
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi anggaran antara Satker Priok dengan Satker Stasmet Kemayoran dibandingkan hasil laporan rekapitulasi dan realisasi belanja satuan kerja dengan evaluasi

hasil penelitian kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI.

3. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi anggaran antara Satker Priok dengan Satker Stas.Geofisika Jakarta dibandingkan hasil laporan rekapitulasi dan realisasi belanja satuan kerja dengan evaluasi hasil penelitian kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI.
4. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi anggaran antara Satker Geofisika dengan Satker Stasmet Kemayoran dibandingkan hasil laporan rekapitulasi dan realisasi belanja satuan kerja dengan evaluasi hasil penelitian kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI.

F. KEGUNAAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan untuk diperoleh hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberi informasi hasil evaluasi penelitian ada tidaknya perbedaan tingkat efisiensi sebagai bahan data dukung dalam rangka meningkatkan kinerja laporan keuangan belanja satuan kerja kegiatan pengadaan

barang dan jasa pada laporan akhir tahun.

2. Memberi informasi hasil evaluasi penelitian ada tidaknya perbedaan tingkat efisiensi anggaran antara Satker Priok dengan Satker Stasmet Kemayoran sebagai bahan data dukung dalam rangka meningkatkan kinerja laporan keuangan belanja satuan kerja kegiatan pengadaan barang dan jasa pada laporan akhir tahun.
3. Memberi informasi hasil evaluasi penelitian ada tidaknya perbedaan tingkat efisiensi anggaran antara Satker Priok dengan Satker Stasiun Geofisika Jakarta sebagai bahan data dukung dalam rangka meningkatkan kinerja laporan keuangan belanja satuan kerja kegiatan pengadaan barang dan jasa pada laporan akhir tahun.
4. Memberi informasi hasil penelitian terhadap laporan rekapitulasi dan realisasi 5 tahun kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI.
5. Memberi informasi hasil penelitian perbedaan tingkat efisiensi pagu anggaran antara Satker Geofisika dengan Satker Stasmet Kemayoran terhadap laporan rekapitulasi dan realisasi 5 tahun terakhir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Anggaran

Anggaran berasal dari kata *budget* (Inggris), sebelumnya dari kata *bougette* (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Anggaran Negara (*state budget*) menurut John F. Due dalam “*Government Finance and Economic Analysis*” adalah *A. Budget, in the general sence of the term, is a financial plan for a spesific priod of time. A government budget therefore, is a sttement of proposed expenditures and expected revenues for the coming period, together with data of actual expenditures and revennues for current and past period*’ Anggaran, dalam arti yang umum dari Keuangan Pemerintah dan Analisis Ekonomi" adalah rencana keuangan untuk jangka waktu priode tertentu. Oleh karena itu suatu anggaran pemerintah, adalah laporan pengeluaran yang diusulkan dan pendapatan yang diharapkan untuk periode mendatang, bersama-sama dengan data pengeluaran aktual dan pendapatan untuk periode saat ini dan sebelumnya " Sementara itu, berdasarkan The National Committee on governmental Accounting (NCGA), “*A budget is plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them.*’ Anggaran adalah rencana

operasi keuangan penjawatahan suatu perkiraan pengeluaran yang diusulkan untuk jangka waktu tertentu dan cara pembiayaan yang diusulkan sesuai anggaran. (Dikutip dari Modul Perencanaan dan Penganggaran APBN Departemen Keuangan RI tahun 2008)

Menurut Bens Wildavsky, seorang senior dan konsultan Penelitian dan kebijakan editor strategis yang bekerja bebas. Pendidikan Universitas yale (1981-1986) berasal dari Washington DC Metro Area, anggaran adalah penyebaran sumber daya keuangan untuk berbagai tujuan manusia dengan pengertian anggaran disebut juga dengan istilah

- a. catatan masa lalu
- b. rencana masa depan
- c. mekanisme pengalokasian sumber daya
- d. metode untuk pertumbuhan
- e. alat penyaluran pendapatan
- f. mekanisme untuk negosiasi
- g. satu bentuk kekuatan kontrol
- h. alat atau jaringan komunikasi

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Konsep *performance budgeting* (penganggaran kinerja) dalam sejarahnya diperkenalkan pertama kali di AS pada tahun 1949 oleh Komisi Hoover dimana reformasi anggaran telah berusaha merubah penekanan anggaran dari

pengendalian belanja *line item* kepada alokasi sumber daya berdasarkan tujuan program dan hasil terukur (GAO, 1993).

Robinson dan Brumby (2005) menjelaskan anggaran berbasis kinerja sebagai prosedur atau mekanisme yang dimaksudkan untuk memperkuat kaitan antara dana yang diberikan kepada entitas sektor publik dengan *outcome* dan/atau *outcome* mereka melalui penggunaan informasi kinerja formal dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Dimana anggaran tersebut berfokus pada aktivitas atau fungsi yang memproduksi hasil dan sumber daya yang digunakan serta memperkenalkan proses penganggaran yang berusaha untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan sumber daya. Pada dasarnya tujuan utama anggaran berbasis kinerja ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik dan GAO mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai konsep yang mengkaitkan informasi kinerja dengan anggaran.

Di Indonesia, Asmadewa (2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja menunjukkan bahwa yang meneliti faktor sumber daya dan informasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja pemerintah pusat. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada faktor sumber daya dan informasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja di pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada di anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Bagi Negara Indonesia sendiri, implementasi anggaran berbasis kinerja atau dalam Permendagri No.13 tahun 2006 disebut dengan anggaran pendekatan prestasi kerja merupakan pendekatan yang relatif baru diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia.

Dalam proses pengimplemetasian anggaran berbasis kinerja, sejumlah literatur dan penelitian mengindikasikan adanya sejumlah aspek yang berpengaruh bagi keberhasilan implementasi tersebut adalah aspek rasional (Julnes dan Holzer, 2001). Aspek rasional adalah aspek yang mendasarkan pada pemikiran logis/penalaran sebagai pertimbangan tertinggi untuk menentukan hal seperti pendapat, perbuatan, penilaian, dan sebagainya (Darmansjah, 2002). Penelitian Wang (2000) menemukan indikasi adanya hubungan antara pengembangan kapasitas

pengukuran kinerja (melibatkan 5 sumber daya dana, staf, dan sistem informasi) dengan penggunaan pengukuran kinerja dalam penganggaran.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, anggaran negara/daerah meliputi

- a. Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja
- b. Gambaran strategi pemerintah dalam penlokasian sumber daya untuk pembangunan
- c. Alat pengendalian
- d. Instrumen politik dan
- e. disusun dalam periode tertentu

Anggaran dapat dibedakan dalam arti

- a. Luas : meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
- b. Sempit : meliputi rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun saja.

Dalam anggaran negara, biasanya disebut dahulu mengenai perencanaan pengeluaran/belanja, baru dikemukakan rencana penerimaannya (sumber daya berbeda dengan anggaran perusahaan yang biasanya disusun dahulu rencana penjualan dan penerimaannya).

Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan BMKG adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen BMKG dalam rangka mencapai Visi dan Misi BMKG.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Anggaran Pendapatan Pemerintah dari berbagai sumber dan Belanja untuk kebutuhan Pemerintah, selanjutnya disebut APBN.

3. Pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pagu adalah alokasi anggaran maksimum yang disediakan Pemerintah untuk Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan pengembangan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam rangka peningkatan kinerja.

Pagu Indikatif adalah pagu awal anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, yang biasa disampaikan

dari Bappenas dan Departemen Keuangan kepada Kementerian Negara/lembaga pada bulan Maret tahun berjalan.

Pagu Sementara adalah pagu awal anggaran belanja Kementerian Negara /Lembaga hasil pembahasan awal dengan DPR-RI, disampaikan dari Bappenas dan Departemen Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga pada bulan Juni tahun berjalan.

Pagu Definitif adalah pagu final hasil pembahasan antara Kementerian Negara/Lembaga dengan masing-masing mitra kerja Komisi DPR-RI, disampaikan dari Bappenas dan Departemen Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga pada bulan Oktober tahun berjalan.

Daftar Isian Pelaksanan Anggaran adalah dokumen keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, selanjutnya disebut DIPA

Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan, terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran.

4. Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Instansi BMKG

Realisasi Anggaran adalah hasil pengeluaran yang digunakan dalam penyelesaian pengadaan barang dan jasa sesuai pelaksanaan kerja dilapangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah daftar kegiatan dengan uraian kebutuhan anggaran sebagai rencana kegiatan tahun yang akan datang, disusun oleh BMKG sebagai Instansi esilon 1, selanjutnya disebut RKA-KL.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja adalah Daftar kegiatan dan kebutuhan anggaran, disusun oleh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Unit Kerja, selanjutnya disebut RKA-SK.

5. Koordinator Wilayah dan Satuan Kerja/Unit Kerja BMKG Propinsi DKI

Koordinator

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut koordinator wilayah propinsi.

Satuan Kerja BMKG adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau berapa kegiatan dari suatu program dengan sumber biaya mengikat dan atau belanja tidak mengikat dan atau belanja modal, selanjutnya disebut Satuan Kerja

Unit Kerja Kantor Pusat BMKG merupakan bagian unit organisasi Kantor Pusat yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program dengan sumber biaya belanja tidak mengikat dan atau belanja modal, kecuali Inspektorat BMKG, selanjutnya disebut Unit Kerja.

6. Kerangka Acuan/TOR

Term of Reference atau Kerangka Acuan adalah penjelasan secara rinci perencanaan kegiatan, selanjutnya disebut TOR/KA.

7. Harga Satuan Umum/HSU

Harga Satuan Umum adalah harga satuan suatu barang/jasa secara umum digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebutuhan anggaran dan penelaahan RKA-KL, yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan, selanjutnya disebut HSU.

Rincian Anggaran Belanja adalah rincian kebutuhan biaya untuk melaksanakan kegiatan, selanjutnya disebut RAB.

Dasar Hukum APBN

Perencanaan dan penyusunan anggaran di Indonesia didasarkan pada :

- a. UU 1945
- b. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- c. UU. No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- d. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

e. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

f. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah. (RKP).

g. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja Pegawai adalah pengeluaran biaya rutin yang dikeluarkan kas negara untuk penerimaan gaji/honorarium pegawai.

8. Belanja pengadaan barang dan jasa.

Belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan kedalam belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Belanja pengadaan jasa konsultan tidak termasuk dalam kategori kelompok belanja jasa.

a. Belanja Pemeliharaan.

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan.

b. Belanja perjalanan

Belanja perjalanan dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset tetap dikategorikan sebagai belanja perjalanan dalam laporan keuangan

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. **Belanja Modal Fisik Lainnya**

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ -pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Sayang tidak dijelaskan bagaimana cara mengetahui niat bukan untuk dijual atau untuk dijual. Demikian juga, apakah niatnya cukup dalam hati atau didokumentasikan?

Upaya menggenjot belanja modal jelas harus disertai dengan meningkatnya kemampuan pemerintah pusat dan daerah menyerap anggaran. Salah satu caranya adalah dengan mempercepat proses tender untuk proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran belanja modal. Dengan begitu,

proyek-proyek itu pun cepat bergulir dan roda ekonomi bergerak. Tentu, harus tetap diingatkan bahwa proses tender yang terburu-buru menyimpan potensi korupsi.

HIPOTESIS PENULISAN

Hipotesis dalam penelitian Kuantitatif dikembangkan dari penelaahan teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan yang memerlukan pengujian secara empiris. Model perhitungan statistik evaluasi yang diterapkan dengan menggunakan beberapa asumsi- dasar pengambilan 3 unsur variabel sample satker dalam menggunakan anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal selama waktu 5 tahun dan bagaimana tingkat efiseiensi yang diharapkan dalam pencapaian hasil laporan rekonsiliasi keuangan dari nilai pagu dan realisasi anggaran yang dipergunakan. berupa model permasalahan yang timbul ditemukan dari variabel sample uraian yang dihadapi.

Ho = Ketersediaan sumber pagu dan realisasi yang memadai berpengaruh positif terhadap efektifitas implementasi anggaran yang gunakan

H1 = Ketersediaan sumber pagu dan railsasi yang tidak memadai berpengaruh

Bisakah pemerintah mempercepat proses tender dengan tetap bersih? Itulah tantangannya.

negatif terhadap efektifitas implementasi anggaran yang digunakan

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak terdapat perbedaan antara tingkat efesiensi penggunaan pagu anggaran Satker Tanjung Priok terhadap hasil laporan realisasi anggaran akhir tahun belanja kegiatan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa di wilayah Propinsi DKI.
2. Tidak terdapat perbedaan antara tingkat efesiensi penggunaan pagu anggaran Satker Stasiun Meteorologi Kemayoran terhadap hasil laporan realisasi anggaran akhir tahun belanja kegiatan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa di wilayah Propinsi DKI
3. Tidak terdapat perbedaan antara tingkat efesiensi tingkat efiseinsi penggunaan pagu anggaran Satker Stasiun Geofisika Jakarta terhadap hasil laporan realisasi anggaran belanja akhir tahun kegiatan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa di wilayah Propinsi DKI

4. Tidak terdapat perbedaan antara tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang efektif dan efiseinsi dapat menjalankan pada masing-masing Satker terhadap kegiatan yang mendukung kelancaran operasional.
5. Tidak terdapat perbedaan antara tingkat efisiensi yang ditempuh apabila dalam pelaksanaan kegiatan anggaran ditemukan ketidaksesuaian dengan besar pagu yang tersedia dalam DIPA.
6. Tidak terdapat perbedaan antara tingkat efisiensi dalam Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Pengadaan Barang dan jasa dapat meningkatkan produktifivitas kerja di satker wilayah Propinsi DKI

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penulis mengadakan penilitian pada satker Koordinator Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada masing-masing Satker di Wilayah Propinsi DKI Jakarta

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan uji banding atas laporan keuangan masing-masing satker yang diperoleh dari hasil laporan rekapitulasi dan realisasi anggaran tahun 2006 s.d 2010 selama 5 tahun dan dibandingkan dengan hasil penelitian yang didapat dengan metoda ANOVA dari hasil tingkat efisiensi pagu anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa inilah yang akan dijadikan dasar acuan (sesuai surat edaran Depkeu.

C. POPULASI DAN SAMPEL.

Variabel sampel data adalah 15 yaitu jumlah total variabel sample keseluruhan belanja barang pada ketiga satker yang dilaksanakan setiap masing – masing Satker Wilayah Propinsi DKI dalam Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dari tahun Anggaran 2006 s.d 2010 yaitu terdiri dari komponen Pagu Belanja Pegawai dan Hasil Belanja Pegawai, Pagu Belanja Barang dan Hasil Belanja Barang, Pagu Belanja Modal dan Hasil Belanja Modal,

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data diperoleh dari hasil laporan rekonsiliasi yang tersimpan dalam program Aplikasi Sakpa (Sistem Akutansi

Pemerintah) dan telah dilakukan audit BPK dari tahun 2006 sampai 2010 untuk 3 Satker Wilayah Propinsi DKI Dengan teknik pengumpulan data hasil Rekonsiliasi tersebut kemudian untuk cara mendapatkannya dengan menjalankan Program Aplikasi Sakpa

Data laporan keuangan tersebut dari hasil perolehan *income* program aplikasi Sakpa, kemudian dikelompokkan dalam format sesuai dengan data yang akan diambil untuk penelitian lebih lanjut yaitu dari anggaran belanja pegawai, anggaran, belanja barang dan anggaran belanja modal, variable independen dan dependen untuk variable anggota sampelnya adalah 3 satker sedangkan jumlah total variabel sample seluruhnya adalah 15 varian.

IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI PENELITIAN

Data hasil laporan rekapitulasi dan realisasi belanja satuan kerja 3 Stasiun selama 5 tahun terakhir dibandingkan dengan hasil perhitungan penelitian yang diperoleh apakah terdapat perbedaan atau tidak? tingkat efisiensi pencapaian pagu

anggaran yang di laksanakan pada urutan satuan kerja masing-masing di wilayah Propinsi DKI.

Data penelitian dikelompokkan kedalam satu satuan kerja dari data hasil rekapitulasi dan realisasi anggaran masing-masing maka, langkah selanjutnya melakukan penjumlahan total masing-masing satker kemudian dapat dilihat hasil tingkat efisiensi perhitungan analisis program excel untuk mengetahui unsur tingkat efisiensi pada masing-masing satker, dibandingkan dengan hasil laporan rekapitulasi dan realisasi anggaran, pembahasan lebih lanjut adalah pengujian hipotesis perhitungan analisis varians untuk mengetahui perbandingan tersebut adalah tingkat efisiensi masing-masing satker yang dijadikan cangkupan penelitian hasil uji hipotesis pada ketiga satker tersebut. Sehingga pada akhirnya hasil perhitungan analisis varians tersebut akan diasumsikan dengan tujuan penelitian yang dimaksud dalam judul penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran dan perbandingan pencapaian tingkat efisiensi yang diinginkan pada masing – masing satker pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di propinsi wilayah pronsi DKI Jakarta.

Tabel A.1

Data Hasil Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Anggaran Keuangan Propinsi DKI tahun 2006

Nama Satker	Pagu B. Peg	Realisasi	Pagu B Barang	Realisasi	P. B Modal	Realisasi
Stasmar T. Priok	714.648.000	775.294.271	325.404.000	324.327.863	1.131.250.000	1.122.413.305
Stasmet Kemayoran	406.803.000	380.754.980	72.486.000	68.586.000	0	0
Stas Geof Jakarta	251.531.000	349.508.346	85.243.000	69.642.000	0	0

Tabel A.2

Data Hasil Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Anggaran Keuangan Propinsi DKI tahun 2007

Nama Satker	Pagu B. Peg	Realisasi	Pagu B Barang	Realisasi	P. B Modal	Realisasi
Stasmar T. Priok	1.062.234.000	1.009.452.040	389.575.000	387.966.029	1.195.641.000	1.175.145.400
Stasmet Kemayoran	597.213.000	468.193.615	79.363.000	73.423.000	0	0
Stas Geof Jakarta	428.888.000	413.338.265	115.405.000	115.229.000	0	0

Tabel A.3

Data Hasil Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Anggaran Keuangan Propinsi DKI tahun 2008

Nama Satker	Pagu B. Peg	Realisasi	Pagu B Barang	Realisasi	P. B Modal	Realisasi
Stasmar T. Priok	1.243.177.000	1.062.920.360	468.087.000	439.775.528	647.500.000	621.249.000
Stasmet Kemayoran	668.343.000	466.048.572	93.283.000	91.218.000	0	0
Stas Geof Jakarta	512.875.000	475.447.384	150.645.000	148.592.000	0	0

Tabel A.4

Data Hasil Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Anggaran Keuangan Propinsi DKI tahun 2009

Nama Satker	Pagu B. Peg	Realisasi	Pagu B Barang	Realisasi	P. B Modal	Realisasi
Stasmar T. Priok	1.210.293.000	71.184.310.312	602.013.000	504.733.091	1.095.410.000	1.073.552.200
Stasmet Kemayoran	536.584.000	501.021.883	100.453.000	91.733.000	0	0
Stas Geof Jakarta	543.184.000	542.453.822	143.853.000	130.369.000	0	0

Tabel A.5

Data Hasil Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Anggaran Keuangan Propinsi DKI tahun 2010

Nama Satker	Pagu B. Peg	Realisasi	Pagu B Barang	Realisasi	P. B Modal	Realisasi
Stasmar T. Priok	1.257.924.000	1.187.439.9	1.228.028.0008	1.082.513.148	1.415.500.000	1.351.472.225
Stasmet Kemayoran	516.593.000	498.865.0	141.156.000	140.156.000	0	0
Stas Geof Jakarta	562.446.000	555.995.4	192.680.000	185.865.000	1.415.500.000	1.351.472.225

maka, dengan cara yang sama, perhitungan efisiensi data tahun 2007 s.d 2010 dapat diperoleh (pada tabelA.6 dibawah ini) adalah sbb.

Tabel A.6

Tingkat pagu efisiensi pagu Satker %			
Tahun	Stamar Priok	Stamet Kemayoran	Stageof Jakarta
2006	102,34	93,75	124,46
2007	97,17	80,05	97,11
2008	90,04	73,17	94,05
2009	95,01	93,06	97,93
2010	92,82	97,15	98,24

Tabel A.7

Tabel efisiensi pagu data hasil laporan rekapitulasi dan realisasi anggaran satuan kerja keuangan Propinsi DKI tahun 2006 s.d 2010 (data hasil laporan terdapat pada lampiran C.2)

Tingkat pagu efisiensi pagu Satker %			
Tahun	Stamar Priok	Stamet Kemayoran	Stageof Jakarta
2006	102,34	93,53	124,46
2007	97,17	80,05	97,11
2008	90,04	72,95	94,05
2009	95,01	93,06	97,93
2010	92,88	97,15	98,06

Tabel A.8

Tabel Hasil Hitung Rasio Uji			
Tahun			
2006	102,34	6,864	47,114496
2007	97,17	1,694	2,869636
2008	90,04	-5,436	29,550096
2009	95,01	-0,466	0,217156
2010	92,82	-2,656	7,054336
	477,38		86,80572
Xrt	95,476		

Tabel A.9

Tabel Hasil Hitung Rasio Uji Analisis Varians Distribusi F Satker Kemayoran			
Tahun	X_2	$X_2 - X_{2rt}$	$(X_2 - X_{2rt})^2$
2006	93,75	6,314	39,866596
2007	80,05	- 7,386	54,552996
2008	73,17	-14,266	203,518756
2009	93,06	5,624	31,629376
2010	97,15	9,714	94,361796
	437,18		423,929562
Xrt	87,436		

Keterangan :

k	3	k = jumlah sampel variabel
T	15	T = jumlah total anggota sampel variabel
df_{num}	2	df_{num} = derajat kebebasan pembilang
df_{den}	12	df_{den} = derajat kebebasan penyebut
α	0,05	α = tingkat kepentingan (tingkat kepercayaan 95%)

F_{cr} 3,885 F_{cr} = batas kritis (dilihat dari Tabel Distribusi F(kurva))

H_0 seluruh mean variabel sampel merata / sama

H_1 seluruh mean variabel sampel belum merata / tidak sama

Tabel A.10

Tabel Hasil Hitung Rasio Uji Analisis Varians Distribusi F Satker			
Tahun	X_2	$X_2 - X_{2rt}$	$(X_2 - X_{2rt})^2$
2006	124,46	22,102	488,49840
2007	97,11	- 5,248	27,54150
2008	94,05	-8,308	69,02286
2009	97,93	-4,428	19,60718
2010	98,24	-4,118	16,95792
	511,79		621,6278
Xrt	102,358		

Tabel A.11

Aturan Keputusan
Perhitungan Rasio Uji (RU) $RU_F = \text{Rasio Uji}$

n		Xrt	n.Xrt
1	5	95,476	477,38
2	5	87,436	437,18
3	5	102,358	511,79
Σ	15		1426,35

$(X_{rt} - X)$	$(X_{rt} - X)^2$	$n(X_{rt} - X)^2$	Σd^2
0,39	0,15	0,74	86,80572
-7,65	58,58	292,92	423,9295
7,27	52,82	264,12	621,6279
		557,78	1132,363

Keterangan :

X 95,09

k - 1 2

σ_{antara} 278,8913

T - k 12

σ_{dalam} 94,36359

RU_F 2,955 $RU_F = \sigma_{\text{antara}} / \sigma_{\text{dalam}}$

Tolak H_0 terima H_1 jika $RU_F > 3,855$

Terima H_0 jika $RU_F < 3,855$

Hipotesis : Karena $RU_F < 3.855$ maka H_0 diterima, yang berarti efisiensi pagu anggaran ketiga satker sudah merata

B. PENGUJIAN PERSYARATAN ANALISIS

Pengujian Asumsi Dasar Analisis Varians akan menjadi teknik statistik yang valid untuk diterapkan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Variabel sampel yang dikaji memiliki distribusi normal
2. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan setiap sampel independen/tidak terikat sampel yang lain,
3. Variabel sampel dimana nilai diperoleh memiliki nilai varians yang sama

Jadi asumsi ketiganya dapat dinyatakan :

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \dots = \sigma_k^2$$

Dimana (k) merupakan jumlah total variabel sampel. Penelitian perhitungan analisis varians untuk mengetahui tingkat efisiensi ketiga variabel tersebut apakah efektifitasnya dalam penggunaan pagu anggaran sudah cukup memadai atau tidak

Dengan menggunakan ANOVA, pembebanan ketiga Satker tersebut merata atau tidak

1. Hipotesis :

$$H_0 : U_1 = U_2 = U_3$$

H_1 : tidak seluruh mean populasi sama

2. $\alpha = 0.05$

3 Dengan menggunakan distribusi F, jumlah variabel sampel $K = 3$ maka derajat kebebasan pembilang, $df_{num} = k - 1 = 3 - 1 = 2$ Banyaknya seluruh sampel $T = 15$, maka derajat kebebasan penyebut, $df_{den} = T - k = 15 - 3 = 12$

4 Batas-batas daerah penolakan/batas kritis uji dua ujung (*two-tailed test*). (lampiran tabel B1 hal.72) Dari tabel F untuk $\alpha = 0.05$ derajat kebebasan pembilang, $df_{num} = 2$ dan derajat kebebasan penyebut, $df_{den} = 12$ dan dan batas kritis $F = 3.855$

5 Aturan keputusan :

Tolak

H_0 dan terima H_1 jika $RUF < 3.855$, jika tidak demikian, terima H_0 dan tolak H_1

6 Rumus Rasio Uji : dapat dilihat dalam

7 Pengambilan Keputusan :

Karena

$RUF < 3.855$ maka $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ diterima,

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Setelah dilakukan Penelitian Rasio Uji Distribusi Frekwensi hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel A.6 , tabel A7 , maka yang menjadi pokok bahasan tujuan penelitian adalah sbb ;

1. Bahwa anggapan/asumsi pertama, perbandingan tingkat efesiensi hasil perhitungan dan laporan ketiga satuan kerja pengadaan barang dan jasa yang dikelola Koordinator Wilayah Propinsi DKI. menunjukkan kesamaan pencapaian sasaran kinerja keuangan, berpedoman pada ketentuan Kementrian keu yang diterapkan pada tingkat efisiensinya berkisar rata-rata 95,% .Dalam pelaksanaan selama kegiatan 5 tahun terakhir, menunjukkan pencapaian sararan kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

2 Hasil perhitungan uji hipotesis menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, ini menunjukkan bahwa parameter ukurnya yang digunakan adalah hasil perhitungan $RUF = \text{Rasio Uji} = 2,955$ (lihat pada tabel A.11 hal 54-55.) dan menentukan batas kritis F_{α} (dapat dilihat pada tabel Distribusi F hal 52) diperoleh batas kritisnya adalah = 3,855, dimana nilai batas kritis tersebut $RUF < 3,855$ maka, pagu untuk ketiga Satker dalam pengalokasian anggaran kegiatan

Pengadaan Barang dan Jasa sudah merata selama pelaksanaan kegiatan 5 tahun terakhir di wilayah Propinsi DKI.

3. Perbandingan tingkat efisiensi pagu anggaran antara Satker Priok dengan Satker Stasmet Kemayoran dari hasil perhitungan adalah sama, dengan demikian tingkat efisiensi antara kedua Satker tersebut mencapai sasaran dalam pengelolaan anggaran yang dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan 5 tahun terakhir terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah Propinsi DKI.

1. Jika dilihat dari tabel parameter Rasio Uji dalam pengalokasian pagu anggaran untuk kedua Satker tersebut tidak mengalami perbedaan dalam pengalokasian pagu anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah Propinsi DKI. Untuk Satker Priok dengan Satker Stas. Geofisika tingkat efisiensi pagu anggaran berkisar diantara 95% dengan demikian tingkat efisiensi antara kedua Satker tersebut pada pelaksanaan kegiatan 5 tahun terakhir terhadap pengadaan barang dan jasa di wilayah Propinsi DKI dapat dimonitoring positif dari tahun ke tahun.

2. Jika dilihat dari tabel parameter Rasio Uji dalam pengalokasian pagu anggaran untuk kedua Satker tersebut tidak mengalami perbedaan yang significant dalam pengalokasian pagu anggaran

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah Propinsi DKI.

3. Perbandingan Geofisika dengan Satker Stasmet Kemayoran tingkat efisiensi pagu anggaran hasil perhitungan dan laporan anggaran belanja 5 tahun terakhir sama tidak ada perbedaan terhadap evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah Propinsi DKI.

Jika dilihat dari tabel parameter Rasio Uji dalam pengalokasian pagu anggaran untuk kedua Satker tersebut tidak mengalami perbedaan dalam pengalokasian pagu anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah Propinsi DKI

Hasil analisis varians menunjukkan bahwa Penggunaan Anggaran secara positif berpengaruh positif terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran berbasis kinerja. yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa khususnya di BMKG Propinsi DKI. Hal ini berarti hipotesis hasil penelitian yang diajukan diterima. Temuan ini konsisten dengan Robinson dan Brumby (2005) menjelaskan anggaran berbasis kinerja sebagai prosedur atau mekanisme yang dimaksudkan untuk memperkuat kaitan antara dana yang diberikan kepada masing-masing satker untuk wilayah propinsi DKI dengan

outcome /atau *outcome* 3 satker (Stasmar T. Priok, Stasmet Kemayoran, Stas Geofisika Jakarta dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Dimana anggaran tersebut berfokus pada aktivitas atau fungsi yang memproduksi hasil dan sumber daya yang digunakan serta memperkenalkan proses penganggaran yang berusaha untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan sumber daya yang pada dasarnya tujuan utama anggaran berbasis kinerja ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja anggaran sebagai konsep yang mengkaitkan dalam menunjang pengadaan barang dan jasa di propinsi DKI.

Sedangkan hipotesa kedua yang peneliti ajukan dalam penelitian ini tidak dapat diterima (ditolak). Hal ini dikarenakan dari analisis varians data independen secara sampel menunjukkan variabel sampel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja sedangkan variabel orientasi tujuan mempunyai pengaruh negatif terhadap efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut menunjukkan tidak terbukti Pengguna Anggaran pihak penyedia barang (user) belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku. sebagaimana dituangkan dalam peraturan RI. No.8 tahun 2008

Hasil uji hepotesis selanjutnya menunjukkan pemerataan dalam penyediaan anggaran alokasi dana dan penetapan anggaran pegawai, barang dan belanja modal di setiap masing-masing unit satuan kerja dalam melaksanakan peraturan baru, serta waktu yang disediakan untuk hal tersebut lebih merupakan hal yang harus dilakukan sebagai bentuk respon birokrasi dan bentuk disiplin untuk menunjukkan bahwa organisasi telah melaksanakan hal yang tepat, tetapi kecenderungan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan jasa belum sepenuhnya menjalankan prosedur kerja dan kapasitas kerja sesuai bobot kinerjanya hal ini disebabkan karena anggota satker dan jumlah seluruh anggota dalam variabel sampel saling independen satu sama lain.

Pengaruh negatif variabel sampel analisis varians menunjukkan bahwa orientasi tujuan terhadap efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja pada satker wilayah Propinsi DKI menurut peneliti karena para pelaksana kegiatan (SDM) pengadaan kurang memiliki sertifikasi keahlian dibidangnya dan tidak memiliki orientasi tujuan pencapaian sasaran yang ditentukan terkait dengan anggaran berbasis kinerja. Orientasi menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan kualitas *output* dan tujuan program yang telah disusun dalam

perencanaan strategis pelaksanaan anggaran merupakan paradigma anggaran tradisional. Dimana paradigma tersebut bertolak belakang dengan anggaran berbasis kinerja yang memperhatikan keterkaitan pagu anggaran dengan *output* dan tujuan program. Hal-hal ini terjadi karena kompetensi ke tiga satker pejabat pengguna anggaran dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa dalam hal pemahaman anggaran berbasis kinerja masih belum dioptimalkan.

Hasil perhitungan analisis varians menunjukkan bahwa Perencanaan pengelolaan anggaran satuan kerja dalam sistem penelaahan dalam DIPA belum sepenuhnya dipahami bila terjadi revisi kegiatan pergeseran antara akun yang dapat mempengaruhi mata anggaran kesatuan sub kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan. jika dilihat dari segi sisi efektifitas dan tingkat efisiensi kinerja secara keseluruhan. Perlu kerjasama yang baik dengan bagian perencanaan anggaran dalam mengusulkan dan menyusun anggaran yang diajukan tahun berjalan.

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa ketiga satker wilayah, sudah merata dalam pendistribusian anggaran yang disahkan dalam DIPA sehingga anggaran yang

dilakukan penelaahan sesuai ketentuan yang disahkan bagian perencanaan anggaran pusat untuk wilayah propinsi DKI dalam proses pembahasan tingkat Rakor diduga sering terjadi hambatan dan kendala dalam mengaktualisasikan pagu indikatif dan pagu definitif.

Secara Umum distribusi frekuensi dan hasil perhitungan analisis varians / hasil uji hipotesis dari hasil perhitungan anggota sampel dan jumlah seluruh anggota variabel sampel menggambarkan permasalahan dan pemecahan yang tidak terbukti menimbulkan permasalahan dalam penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa di Wilayah propinsi DKI sepenuhnya sesuai basis kinerja yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan.

Penerapan Asumsi Hasil Penelitian Terhadap Perumusan Masalah

1 Menunjukkan gambaran laporan realisasi penggunaan anggaran terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di BMKG Propinsi DKI selama laporan tahun 2006 s.d 2010 menunjukkan tingkat efektifitas dan sasaran pencapaian kinerja keuangan yang memberikan target memadai dari segi akuntabilitas.

2 Sistem perencanaan kegiatan anggaran pengadaan barang dan jasa di BMKG Propinsi DKI untuk tahun mendatang lebih baik dan ditingkatkan lagi dari hasil

rekonsiliasi laporan keuangannya yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tertib dan taat serta transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Proses pengajuan/penyusunan rencana kegiatan anggaran kementerian / lembaga masing-masing satker dapat dikoordinasikan bersama-sama untuk mengetahui anggaran pagu DIPA yang akan dilaksanakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab IV pengujian hipotesis penelitian maka, secara garis besarnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Terdapat kesamaan hasil perhitungan dan hasil laporan rata-rata tingkat efisiensi anggaran satker koordinator dengan satker wilayah masing-masing hal ini menunjukkan kegiatan pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa memenuhi program pengembangan dan pembinaan BMKG pada umumnya khususnya dilingkungan wilayah Propinsi DKI.
2. Terdapat persamaan tingkat efisiensi anggaran antara Satker Priok dengan Satker Stasmet Kemayoran hasil perhitungan dan hasil laporan akan

tetapi dalam sisi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran satuan kerja pencapaian target penerapan masih kurang dari ketentuan 95 % khususnya pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2007 dan 2008 hal ini dikarenakan faktor pengendali koordinasi yang belum mendukung kinerja laporan keuangan sepenuhnya secara gradual dan sistematis di satuan unit kerja masing-masing dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk wilayah Propinsi DKI.

3. Terdapat persamaan tingkat efisiensi hasil perhitungan dan hasil laporan antara Satker Priok dengan Satker Stas. Geofisika Jakarta mencapai rata-rata diatas 95% hal ini menunjukkan penerapan ketentuan menkeu terlampaui untuk tetap menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Terdapat persamaan tingkat efisiensi anggaran antara Satker Geofisika dengan Satker Stasmet Kemayoran hasil perhitungan dan hasil laporan dari sisi pencapaian anggaran satker Geofisika lebih baik daripada stasiun Meteorologi Kemayoran dalam pengelolaan/pelaksanaan anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa

B. SARAN

Untuk lebih meningkatkan efektifitas kerja dan tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di tahun mendatang, perlu dipertimbangkan pembahasan secara terpadu dari masing-masing pembuat keputusan dalam mensyahkan asulan pagu anggaran di masing-masing Satker sebelum usulan yang diajukan dari masing-masing Satker disetujui bagian perencanaan keuangan dalam DIPA. Untuk itu diharapkan para pejabat kuasa pengguna anggaran dapat berperan aktif memahami anggaran berbasis kinerja.

Untuk penelitian yang lebih luas lagi perlu melibatkan jajaran Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro program komputer termasuk program dan unit organisasi yang meliputinya. Sehingga data yang dihasilkan dari satuan-satuan kerja tersebut dapat menggambarkan dinamika yang sebenarnya terjadi, sehingga pada saat rekonsiliasi laporan keuangan pada setiap semester dapat diselesaikan pada waktunya dengan hasil laporan Wajar Tanpa Pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

Antony, R. N., J. Dearden dan N. M. Bredford. 1992. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta. Binarupa Aksara.

Aliminsyah dan Padji. 2003. *Kamus Istilah Akuntansi dan Perbankan*. Bandung. Yrama Widya.

Asmadewa, I. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Survei pada Pemerintah Pusat)*. Thesis UGM. Unpublished.

Alha Pangeran. (1998). *BMP Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Karunika.

Bertens. (1989). *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bahan Ajar, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (2006) *tentang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa*.

Barry Render Jay Heizer (2004) *Manajemen Operasi* Penerbit Salemba Empat

Crain, W. M. dan J. B. O'Roack. 2004. *The impact of performance-based budgeting on state fiscal performance. Economics of governance*, Vol 168-186.

Dajan A. (1975) *Pengantar Metoda Statistik* Jilid I LP3ES Jakarta.

- Dr.Faried Wijaya Mansoer,MA (2004)
Jakarta Pusat Penerbitan
UT.edisi ke 1 cetakan
pertama tentang *Metode
Penelitian Bisnis*.
- Harinaldi,(2005) *Prinsip-prinsip Statistik,
untuk sains*, Jakarta.
- Kazmier, L. J., *Theory and Problems of
Bussiness Statistics*,
Schaum's outline series, Mc
Graw Hill Book Company,
New York.
- Modul Perencanaan dan Penganggaran
(2008) edisi 01 s.d edisi 03
tentang *Program Percepatan
Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah* Jakarta.
- Wonnacott, T.H. and Wonnacott R. J.,
*Introductory Statistics for
Bussiness and Economics*,
John Willey & Sons, New
York.